

PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA MODAL, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA/KABUPATEN DI JAWA TIMUR

Rosalia Edira

rosaliaedira.0950@gmail.com

Dr. Suwardi Bambang Hermanto, M.M., Ak., CA.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of employees' expenditure, capital expenditure, and the number of people on local-owned source revenue. The population was districts/cities in East Java from 2017-2020. The research was quantitative. Moreover, the data collection technique used purposive sampling. The data were taken from the website of DJPK, financial Ministry which the site was www.djpk.depkeu.go.id, and also from Statistics Indonesia, East Java during 2017-2020. Furthermore, the data in the form of Local Government Realization Report consisted of data Local-owned Source Revenue, Employees' Expenditure, and Capital Expenditure. Meanwhile, the data on the number of people were taken from Statistics Indonesia, East Java. From the population which was 38 districts or cities in East Java from the observed data, it found that there were 152 samples. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution) 25. The research concluded that employees' expenditure had a positive effect on Local-owned Source Revenue. On the other hand, capital expenditure did not have a negative effect on Local-owned Source Revenue. Likewise a number of people did not have a negative effect on Local-owned Source Revenue.

Keywords: employees' expenditure, capital expenditure, number of people local-owned source revenue

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh belanja pegawai, belanja modal dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah. Objek penelitian Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2017-2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sampel penelitian diperoleh menggunakan metode *purposive sampling* yang diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melalui internet dengan alamat situs di www.djpk.depkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur untuk periode 2017-2020. Informasi berupa Laporan Realisasi APBD yang diperoleh data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai (BP), Belanja Modal (BM). Sedangkan Jumlah Penduduk (JP) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38 Kabupaten/Kota dari data yang diobservasi sebanyak 152 sampel. Pengujian data dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, belanja modal tidak berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah, jumlah penduduk tidak berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: belanja pegawai, belanja modal, jumlah penduduk, pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan (Sanjaya dan Wijaya, 2020). Pemerintah daerah mengurus rumah tangganya perlu diberikan sumber pendapatan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah (Undang-undang No. 32 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah

daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Dewi dan Suartana, 2018). Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Budiman *et al*, 2021). Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. hal tersebut dikarenakan pendapatan asli daerah antara satu daerah dengan yang lain berbeda-beda tergantung seberapa besar kekayaan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu dengan pemaksimalan belanja pegawai, belanja modal dan jumlah penduduk diharapkan dapat meningkatkan PAD pada suatu pemerintahan daerah (Pratolo dan Yudha, 2012).

Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pekerjaan pemerintah (Pratolo dan Yudha, 2012). Belanja pegawai sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan perannya dalam pertumbuhan ekonomi di pemerintahan daerah. Belanja pegawai yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai. Semakin tinggi keperluan belanja pegawai maka pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan PAD agar dapat memenuhi kebutuhan akan belanja pegawai. Karena pembiayaan atas belanja pegawai diusahakan dari PAD.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap (Jaya dan Dwirandra, 2014). Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan PAD. Infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Bisa diartikan bahwa sarana dan prasarana yang maksimal akan menarik investor untuk berinvestasi dan membangun usaha baru.

Oleh sebab itu meningkatnya investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Namun terkadang peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal karena PAD banyak terserap untuk membiayai biaya lainnya. Hal ini disebabkan karena PAD yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya seperti belanja pegawai dan keseharian pemerintah.

Jumlah Penduduk merupakan suatu indikator penting dalam suatu negara. Jumlah penduduk merupakan faktor penting yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga. Jumlah penduduk sangat berperan penting dalam pendapatan asli daerah karena pendapatan yang diperoleh akan meningkat apabila jumlah penduduk banyak. Jumlah penduduk dipandang sebagai aset apabila meningkatkan kualitas keahlian atau keterampilan sehingga meningkatkan pendapatan nasional.

Menurut Priyono (2016) penambahan penduduk yang tinggi harus diiringi dengan perubahan teknologi yang mendorong tabungan skala ekonomi didalam produksi. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian dapat diuraikan, sebagai berikut: (1) Apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?, (2) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?, (3) Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?, Tujuan dari penelitian ini diantaranya: (1) Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai terhadap pendapatan asli daerah, (2) Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap

pendapatan asli daerah, (3) Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori agensi merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut prinsipal dan yang lainnya disebut dengan agen (Budiman *et al*, 2021). Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan kepada agen. Sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal. Teori keagenan pada penelitian ini bisa ditinjau melalui interaksi antara pemerintah pusat menggunakan pemerintah daerah pada penyaluran dana perimbangan dan juga interaksi antara masyarakat. Teori keagenan terdapat pada interaksi wilayah menggunakan warga. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan asal daya pada wilayah berupa retribusi, pembayaran pajak dan sebagainya supaya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah wilayah pada hal ini menjadi agen seharusnya memberi timbal balik terhadap warga menjadi bentuk pelayanan publik yang memadai yang dibiayai oleh pendapatan daerah itu sendiri. Konflik keagenan muncul ketika suatu pemerintah daerah yang mempunyai PAD tinggi akan lebih mementingkan kepentingan pemerintah daerah itu sendiri dengan merancang APBD dengan alokasi belanja operasi yang besar. Alokasi belanja yang besar contohnya belanja pegawai dibandingkan dengan anggaran belanja modal yang dimana realisasinya dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Teori Stakeholder

Stakeholder theory menyampaikan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi buat kepentingannya sendiri tetapi wajib menaruh manfaat bagi stakeholder (Ghozali dan Chariri, 2007:409). Stakeholder theory adalah sekelompok orang, komunitas atau rakyat baik secara keseluruhan juga parsial yang memiliki interaksi dan kepentingan terhadap organisasi. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan pada roda pemerintah wajib menekankan aspek kepentingan masyarakat selaku stakeholder. Caranya dengan menggunakan alokasi pendapatan daerahnya sebagai belanja modal yang dimanfaatkan dan digunakan secara langsung oleh masyarakat sebagai stakeholder. Apabila pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan ke belanja modal akan menaruh dampak kepuasan warga terhadap pemerintah wilayah sebagai stakeholder. Hubungan stakeholder dengan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah merupakan pihak yang berkepentingan bisa mengatur laju pertumbuhan penduduk menggunakan pengambilan kebijakan yang tepat. Hal tersebut agar jumlah penduduk bisa dikendalikan dan mempunyai kualitas yang baik. Ketika pendapatan penduduk besar maka tingkat konsumsi semakin besar, hal ini berpengaruh terhadap perkembangan disekitar yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Undang-undang No.32 tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah rencana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD hakekatnya adalah satu instrument yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Gambaran tentang keuangan daerah tercermin pada aturan pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam setiap tahun anggaran baik ditingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota (Idayati, 2006). APBD memiliki struktur antara lain Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Laporan realisasi disusun untuk menginformasikan nilai

sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional. APBD disusun untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan rancangan APBD berpedoman dalam rencana pemerintah daerah untuk tercapainya tujuan negara.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan (Sanjaya dan Wijaya, 2009). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah (Arifin *et al*, 2013). Sumber pendapatan tersebut berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah sendiri merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Payu, 2014).

Pajak daerah sebagai salah satu sumber yang diharapkan memberikan kontribusi yang diharapkan memberikan kontribusi yang besar bagi daerah sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hasil retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Ramadhan, 2019). Retribusi daerah merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap PAD suatu daerah. Retribusi daerah sendiri terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Pasal 57 UU No. 32 Tahun 2004 juga menjelaskan lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pekerjaan pemerintah (Pratolo dan Yudha, 2012). Belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk belanja pegawai sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan perannya dalam pertumbuhan ekonomi di pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan peningkatan belanja pegawai sebagai upaya memaksimalkan kinerja tiap pegawai disuatu pemda (Pratolo dan Yudha, 2012). Belanja Pegawai berperan penting dalam kinerja perangkat daerah. Hal tersebut dikarenakan kompensasi sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan mendorong produktifitas kerja perangkat daerah. Belanja pegawai memiliki kategori kelompok-kelompok yang terdiri dari Gaji, Tunjangan, Honorarium dan Vakasi.

Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap (Jaya dan Dwirandra, 2014). Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan PAD. Secara teoritis terdapat tiga cara memperoleh aset tetap yakni dengan menukar dengan aset tetap lainnya, membeli atau juga dengan membeli. Penerimaan PAD yang semakin bertambah diharapkan mampu meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang semakin membaik (Jaya dan Dwirandra, 2014). Belanja modal sendiri terbagi menjadi lima kelompok

yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigrasi dan Jaringan, Belanja Modal Fisik Lainnya. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila memperoleh aset tetap diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan, pengeluaran tersebut mengakibatkan perolehan aset tetap atau aset lain yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas dan pengeluaran melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan suatu indikator penting dalam suatu Negara (Nugraheni *et al*, 2019). Jumlah penduduk merupakan faktor penting yang data digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia menurut para perencana pembangunan dianggap sebagai modal dasar pembangunan sekaligus menjadi beban evolusi (Priyono, 2016). Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban apabila hanya menuntut pelayanan social dan tingkat produktifnya rendah yang menjadi tanggungan bagi penduduk yang bekerja secara efektif. Dampak positif yang diterima dengan adanya penduduk bisa menaikkan aktivitas perekonomian daerah dan meningkatkan PAD. Jika suatu daerah memiliki jumlah penduduk yang sangat sedikit maka penduduk tersebut tidak akan dapat menggunakan sumber dayanya seefisien mungkin. Penambahan penduduk merupakan hal yang dibutuhkan dan bukan masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan pendapatan asli daerah (Nugraheni *et al*, 2019).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Pendapatan Asli Daerah

Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pekerjaan pemerintah (Pratolo dan Yudha, 2012). Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam PAD. Semakin sedikit porsi belanja pegawai yang digunakan untuk belanja aparatur maka PAD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang mendukung PAD. Semakin tinggi keperluan belanja pegawai maka pemerintah wajib berusaha menaikkan PAD supaya memenuhi kebutuhan kebutuhan akan belanja pegawai. Lantaran pembiayaan atas belanja pegawai diusahakan dari pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya kesejahteraan bisa menaikkan daya beli terhadap suatu barang dan jasa sebagai meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pula pegawai. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pegawai tentunya akan menaikkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis ditetapkan sebagai berikut:

H₁ : Belanja Pegawai berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap (Jaya dan Dwirandra, 2014). Tujuan pembangunan aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan PAD. Belanja modal dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara menambah aset ataupun kekayaan milik pemerintah daerah agar bisa menambahkan belanja yang memiliki sifat rutin. Belanja modal dilakukan untuk membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan disuatu daerah. Belanja modal adalah peranan penting suatu institusi atau badan memperoleh aset tetap dengan membeli. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis ditetapkan sebagai berikut:

H₂ : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Jumlah penduduk adalah indikator penting di dalam suatu negara. Jumlah penduduk adalah faktor penting yang bisa digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga. Jumlah penduduk sangat berperan penting dalam pendapatan asli daerah karena pendapatan yang diperoleh akan meningkat apabila jumlah penduduk banyak. Menurut Priyono (2016) besarnya jumlah penduduk dapat mempengaruhi besarnya pendapatan asli yang diperoleh. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga meningkat. Namun hal tersebut wajib disertai dengan pembentukan modal, yang diwaktu tertentu menaruh efek secara langsung terhadap pendapatan asli daerah. Seperti pemungutan pajak dan retribusi daerah dari penduduk ke pemda. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis ditetapkan sebagai berikut:

H₃ : Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dokumenter dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Alat penelitian yang digunakan sebagai pengumpulan data, dan data statistik digunakan untuk analisis data dengan tujuan menguji hipotesis (Sugiyono, 2015). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada periode 2017-2020 dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2017-2020. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Timur yang terdaftar di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan berdasarkan laporan APBD selama periode tahun 2017-2020.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Timur yang terdaftar di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan berdasarkan laporan APBD selama periode 2017-2020. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah berikut: (1) Belanja Pegawai yang terdaftar di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada periode 2017-2020, (2) Belanja Modal yang terdaftar di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada periode 2017-2020, (3) Jumlah Penduduk yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2017-2020.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data sekunder diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melalui internet dengan alamat situs di www.djpk.depkeu.go.id. Laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai (BP), Belanja Modal (BM). Sedangkan data mengenai Jumlah Penduduk (JP) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dengan alamat situs di www.jatim.bps.go.id.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah diukur dari total penjumlahan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Dengan begitu rumus yang digunakan dalam perhitungan penelitian ini adalah:

$$PAD = \frac{\Sigma \text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\Sigma \text{Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)}} \times 100\%$$

Variabel Independen

Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pekerjaan pemerintah (Pratolo dan Yudha, 2012). Belanja pegawai diukur dari total penjumlahan belanja pegawai pada kelompok belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Dengan begitu rumus yang digunakan dalam perhitungan penelitian ini adalah:

$$\text{Belanja Pegawai} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap (Jaya dan Dwirandra, 2014). Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga data meningkatkan PAD. Belanja modal diukur dari total penjumlahan belanja modal pada kelompok belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Dengan begitu rumus yang digunakan dalam perhitungan penelitian ini adalah:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan suatu indikator penting dalam suatu negara. Jumlah penduduk yang besar bagi para perencana pembangunan dipandang sebagai aset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus beban pembangunan (Priyono, 2016). Jumlah penduduk diukur dari total penduduk yang berdomisili di wilayah Jawa Timur. Dengan begitu rumus yang digunakan dalam perhitungan penelitian ini adalah:

$$\text{Jumlah Penduduk} = \frac{\Sigma \text{Penduduk Kabupaten atau Kota per Tahun}}{\Sigma \text{Penduduk Jawa Timur Per Tahun}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berguna untuk memberikan gambaran mengenai suatu data agar data yang disajikan mudah dipahami bagi pembacanya. Analisis deskriptif menguraikan berbagai karakteristik data seperti rata-rata (*mean*), simpangan baku (*standard deviation*), nilai minimum, serta nilai maksimum.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Dewi dan Suartana (2018) Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas menguji model regresi dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, apabila data yang di uji mempunyai nilai lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan normal dan sebaliknya. Dasar pengambilan uji *Kolmogorov-smirnov* jika data yang diuji menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Apabila data yang diuji menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi dinyatakan tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolenearitas

Uji Multikolenearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolenearitas dalam model regresi data dilihat melalui nilai toleransi dan nilai (VIF) *Variance Inflation Factor*. Apabila nilai tolerance yang diperoleh $\leq 0,10$ atau sama dengan $VIF \geq 10$, maka nilai tersebut menunjukkan adanya multikolenearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Uji autokorelasi diuji menggunakan Durbin Watson dengan *rule of thumb* sebagai berikut : (1) Apabila nilai DW < -2 maka terjadi autokorelasi positif, (2) Apabila $-2 \leq$ nilai DW ≤ 2 maka terjadi non autokorelasi, (3) Apabila nilai DW > 2 maka terjadi autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan (Rakatitha dan Gayatri, 2017). Jika varian dari residual pengamatan lain tidak memiliki perubahan, maka data disebut homoskedastisitas dan jika sebaliknya maka disebut heteroskedastisitas, uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linier berganda. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$PAD = \alpha + \beta_1BP + \beta_2BM + \beta_3JP + e$$

Keterangan:

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
α	: Konstanta
$\beta_1\beta_2\beta_3$: Koefisien regresi variabel independen
BP	: Belanja Pegawai
BM	: Belanja Modal
JP	: Jumlah Penduduk
e	: error

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang penting bagi regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil akan menunjukkan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Model dianggap baik apabila koefisien determinasi sama dengan atau mendekati 1 (Mardiana, 2021).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen yaitu laba berengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji koefisien regresi kelayakan model digunakan untuk menguji apakah model regresi sudah cocok atau tidak dengan menggunakan Uji F. kriteria dalam pengambilan keputusannya yaitu: (1) Apabila F-hitung > F Tabel < $\alpha = 0,05$ maka model penelitian mampu memprediksi variabel dependen, (2) Apabila F-hitung < F Tabel > $\alpha = 0,05$ maka model penelitian belum tepat dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Budiman *et al*, 2021). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 (5%). Jika nilai signifikan uji t < 0,05, maka H₀ ditolak dan menunjukkan variabel bebas atau variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun jika nilai signifikan uji t > 0,05 maka H₀ diterima dan menunjukkan variabel bebas atau variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melalui internet dengan alamat situs di www.djpk.depkeu.go.id. Laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai (BP), Belanja Modal (BM). Sedangkan data mengenai Jumlah Penduduk (JP) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada periode tahun 2017-2020 dengan alamat situs di www.jatim.bps.go.id.

Berdasarkan data laporan dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama tahun 2017-2020 telah didapatkan sebanyak 152 sampel yang memenuhi kriteria. Berikut hasil proses pemilihan sampel kabupaten/kota berdasarkan kriteria yang sudah ada:

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	38	38	38	38	152
2	Belanja Pegawai (BP)	38	38	38	38	
3	Belanja Modal (BM)	38	38	38	38	
4	Jumlah Penduduk (JP)	38	38	38	38	
Jumlah Sampel						152

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Dalam Tabel 1 ditunjukkan kabupaten/kota yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017-2020 terdapat 38 kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang terdaftar pada periode tahun

2017-2020 adalah Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu. Dengan begitu sampel kabupaten/kota yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 152 sampel dari 38 kabupaten/kota.

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Analisis Deskriptif
Descriptive Statistic

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	152	,038	,500	,083	,0686
BP	152	,253	,518	,416	,0546
BM	152	,081	,463	,180	,0549
JP	152	,003	,073	,026	,0165
Valid N (listwise)	152				

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2020 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar ,083 dengan nilai standard deviasi sebesar ,0663. Hal ini menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi, yang memiliki makna objek observasi variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai yang relative sama. Nilai minimum variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar ,038 yaitu dimiliki oleh Kabupaten Bondowoso pada tahun 2019. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,500 dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2020. Hal tersebut memperlihatkan bahwa selama tahun penelitian 2017-2020 Kabupaten Bondowoso memiliki nilai Pendapatan Asli daerah yang rendah dan Kota Surabaya memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi.

Variabel Belanja Pegawai (BP) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2020 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar ,416 dengan nilai standard deviasi sebesar ,0546. Hal ini menunjukkan nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi, yang memiliki makna objek observasi variabel Belanja Pegawai memiliki nilai yang relative sama. Nilai minimum variabel Belanja Pegawai sebesar ,253 yaitu dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020, Sedangkan nilai maksimum sebesar ,518 yaitu dimiliki oleh Kota Malang pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Pegawai yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai. Dengan meningkatnya kesejahteraan tersebut dapat meningkatkan daya beli terhadap suatu barang dan jasa sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Variabel Belanja Modal (BM) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2020 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar ,180 dengan nilai standard deviasi sebesar ,0549. Hal ini menunjukkan bahwa nilai mean lebih kecil dari nilai standar deviasi, yang memiliki makna sebaran dari variabel data yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari rasio Belanja Modal terendah dan tertinggi. Nilai minimum variabel Belanja Modal sebesar ,081 yaitu dimiliki oleh Kota Batu pada tahun 2020, Sedangkan nilai maksimum sebesar ,463 yaitu dimiliki oleh Kabupaten Blitar pada tahun 2020. Dengan demikian semakin tinggi Belanja Modal belum tentu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dikarenakan pengeluaran ini ditunjukkan untuk menambah

aset daerah. Besarnya belanja modal seharusnya diikuti dengan keefektifan belanja modal yang ditunjukkan untuk kepentingan publik.

Variabel Jumlah Penduduk (JP) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017-2020 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar ,026 dengan nilai standard deviasi sebesar ,016. Hal ini menunjukkan nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi, yang memiliki makna objek observasi variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai yang relative sama. Nilai minimum variabel Jumlah Penduduk sebesar ,003 yaitu dimiliki oleh Kota Mojokerto pada tahun 2017, Sedangkan nilai maksimum sebesar ,073 yaitu dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2017. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk yang besar belum tentu dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk belum seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa serta kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

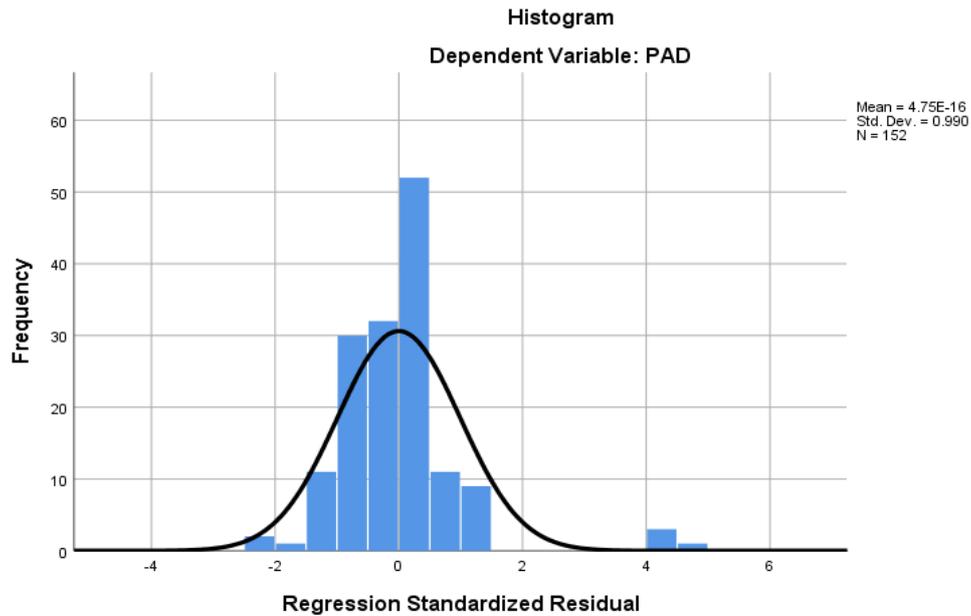
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kolmogorov smirnov dan pendekatan grafis. Hasil dari pendekatan grafis dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	BP	BM	JP
N		152	152	152	152
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0837	.4166	.1806	.0263
	Std. Deviation	.06866	.05464	.05498	.01656
Most Extreme Differences	Absolute	.270	.060	.098	.157
	Positive	.270	.038	.098	.157
	Negative	-.256	-.060	-.059	-.082
Test Statistic		.270	.060	.098	.157
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	.002 ^{c,d}	.001 ^c	.000 ^c

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Seperti terlihat dari Tabel di atas, dengan menggunakan metode uji *Kolmogorov-smirnov*, hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap variabel independen tidak berdistribusi normal dan memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0.000.



Gambar 1
Grafik Histogram Data Asli
Sumber: Data sekunder diolah, 2022

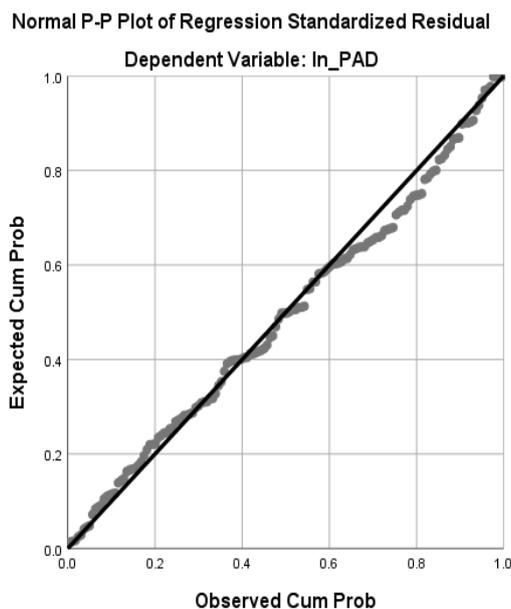
Dari hasil diatas menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi menceng (swekness) dan tidak normal. Berdasarkan grafik diatas maka perlu dilakukan transform (Ln) agar data menjadi normal.

Tabel 4
Uji Normalitas Data (Data Transformasi Ln)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		152
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,39860734
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,069
	Negative	-,033
Test Statistic		,069
Asymp.Sig. (2-tailed)		,074 ^c

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Seperti terlihat dari Tabel di atas, dengan menggunakan metode uji Kolmogorov-Smirnov dengan transformasi Ln dengan menggunakan variabel LnPAD, hasil pengujian menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikan > 0,05 yaitu ,074. Sehingga dapat dikatakan bahwa transformasi sudah berhasil terdistribusi normal. Setelah itu dapat melanjutkan pada uji normalitas dengan memakai metode analisis grafik dapat dilihat dengan *normal probability plot*.



Gambar 2
Grafik Normal P-P Plot
Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Menurut Ghozali (2011) jika data menyebar secara diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka pola menunjukkan distribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi klasik. Maka dari itu gambar diatas menunjukkan bahwa peneliti berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolineritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
1	(Constant)	-3.921	.469		-8.367	.000		
	LnBP	-1.602	.276	-.486	-5.811	.000	.725	1.380
	LnBM	.007	.133	.004	.051	.959	.750	1.334
	LnJP	.028	.042	.048	.667	.506	.961	1.040

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5 maka dapat dilihat dari hasil uji multikolineritas yang menggunakan SPSS versi 25 menunjukkan VIF untuk (BP) sebesar 1.380, (BM) sebesar 1.334, (JP) sebesar 1.040. Hasil pengujian menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10, yaitu nilai *tolerance* lebih dari 0.10 untuk (BP) sebesar 0.725, (BM) sebesar 0.750, (JP) sebesar 0.961. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Dapat dilihat bahwa hasil uji autokorelasi yang menggunakan uji *Durbin-Watson* (Uji D-W) ada SPSS versi 25 berdasarkan Tabel 6, nilai *Durbin-Watson* (Uji D-W) sebesar 0.465 maka dapat disimpulkan bahwa adanya autokorelasi. Karena hasil uji autokorelasi yang dideteksi

menggunakan uji *Durbin-Watson* (D-W) angka *Durbin-Watson* (D-W) diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

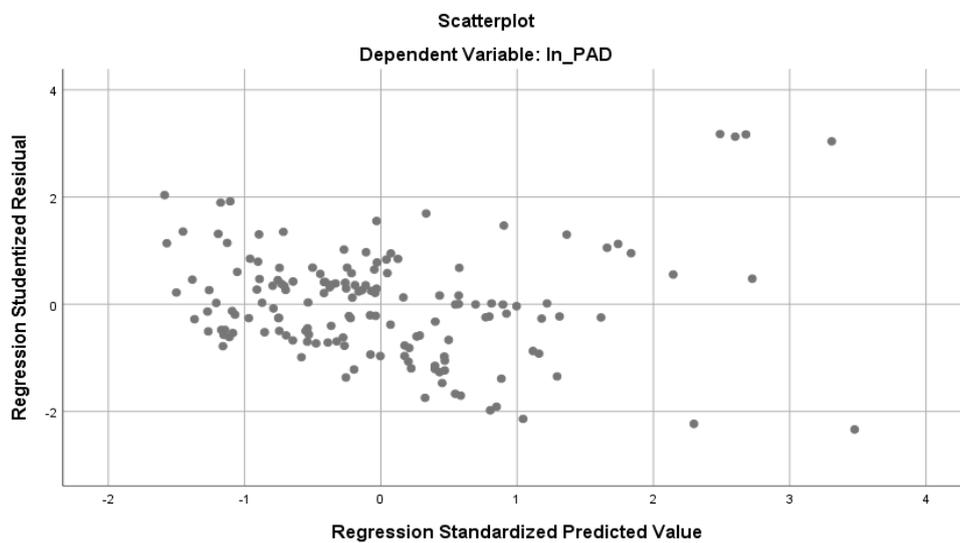
Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.499 ^a	.249	.234	.40263	.465

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Uji Heteroskedastisitas

Jika melihat *scatterplot* pada Gambar 5 terlihat bahwa titik tersebar secara acak, tidak ada pola yang jelas dan terdapat *scatterlot* di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak memiliki varians heteroskedastisitas. Sehingga model regresi ini memungkinkan untuk menentukan nilai perusahaan berdasarkan masukan dari variabel independen.



Gambar 5

Grafik Scatterplot

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk menguji seberapa besar variabel independen yang terdiri dari belanja pegawai (BP), belanja modal (BM), jumlah penduduk (JP) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Berikut ini merupakan hasil dari analisis linier berganda yang menggunakan SPSS versi 25 yaitu:

Tabel 7
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3.921	.496		-8.367	.000		
	LnBP	-1.602	.276	-.486	-5.811	.000	.725	1.380
	LnBM	.007	.133	.004	.051	.959	.750	1.334
	LnJP	-.028	.042	.048	.667	.506	.961	1.040

a. Dependent Variabel: PAD

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Pada Tabel 7 menunjukkan model persamaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$PAD = \alpha + \beta_1BP + \beta_2BM + \beta_3JP + e$$

$$PAD = -3.921 + \beta_1 -1.602 + \beta_2 0.007 + \beta_3 -0.028 + e$$

Konstanta

Nilai konstanta dari persamaan linier berganda Tabel 7 diatas adalah -3.921 yang menunjukkan angka negative bahwa variabel Jumlah Penduduk (JP), Belanja Modal (BM), dan Belanja Pegawai (BP) dianggap oleh konstanta mengalami penurunan.

Koefisien Regresi Belanja Pegawai

Nilai koefisien regresi Belanja Pegawai (BP) sebesar -1.602 yang artinya belanja pegawai (BP) menunjukkan arah negative antara Belanja Pegawai dengan Pendapatan Asli Daerah. Nilai tersebut menunjukkan setiap penambahan satu variabel Belanja Pegawai maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar = -1.602.

Koefisien Regresi Belanja Modal

Nilai koefisien regresi Belanja Modal (BM) sebesar 0.007 yang artinya belanja modal (BM) menunjukkan arah positif dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pengaruh positif di sini adalah setiap kenaikan belanja modal maka akan mengalami penambahan pendapatan satu variabel Belanja Modal maka Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar = 0.004.

Koefisien Regresi Jumlah Penduduk

Nilai koefisien regresi Jumlah Penduduk (JP) sebesar -0.028 yang artinya jumlah penduduk (JP) menunjukkan arah negatif antara Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Nilai tersebut menunjukkan setiap penurunan satu satuan variabel Jumlah Penduduk maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar = -0.023.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam variasi variabel independennya, sedangkan yang lain dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model (Ghozali, 2018). Besarnya kontribusi yang diberikan oleh belanja pegawai (BP), belanja modal (BM) dan jumlah penduduk (JP) sebagai variabel independen dalam menjelaskan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel dependen.

Jika nilai determinasi mendekati nilai 1, maka semakin baik variabel independen memiliki kemampuan dalam menjelaskan variabel dependennya. Berikut merupakan hasil koefisien determinasi menggunakan SPSS versi 25:

Tabel 8
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.499 ^a	.249	.234	.40263	.465

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Dari Tabel 8 hasil uji determinasi (R_{square}) didapatkan nilai sebesar 0,249 atau 24,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Pegawai (BP), Belanja Modal (BM) dan Jumlah Penduduk (JP) sebagai variabel independen dapat memberikan informasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai variabel dependen. Dan sisanya sebesar 75,1% dijelaskan oleh faktor lain diluar model. Dan angka pada koefisien korelasi R juga menunjukkan hubungan keterkaitan antara variabel Belanja Pegawai (BP), Belanja Modal (BM) dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai hubungan yang kuat karena menunjukkan angka sebesar 0,499.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menguji ketepatan model regresi variabel belanja pegawai (BP), belanja modal (BM) dan jumlah penduduk (JP) sebagai variabel independen dapat memberikan informasi mengenai pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji F < 0,05, maka dikatakan model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian. Berikut hasil dari uji kelayakan model (uji F) yang menggunakan SPSS versi 25 yaitu:

Tabel 9
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7.971	3	2.657	16.391	.000 ^b
Residual	23.992	148	.162		
Total	31.964	151			

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Dapat diketahui bahwa pada Tabel 9 uji statistic F diperoleh nilai F hitung sebesar 16.391 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 artinya PAD signifikansi < 0.05. Maka disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan pada penelitian. Dengan demikian model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan asli daerah (PAD).

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk menjelaskan koefisien variabel bebas (independen) dapat menggunakan *unstandardized coefficients*. Jika nilai signifikansi uji t < 0,05, maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dapat dilihat dapat menggunakan aplikasi program SPSS 25 pada uji hipotesis berikut:

Tabel 10
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-3.921	.469		-8.367	.000
	LnBP	-1.602	.276	-.486	-5.811	.000
	LnBM	.007	.133	.004	.051	.959
	LnJP	.028	.042	.048	-.667	.506

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 10, hasil uji t dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Variabel Belanja Pegawai memiliki nilai t sebesar -5.811. Dengan uji signifikansi yang dilakukan didapatkan bahwa p -value t sebesar 0.000. Karena nilai p -value $< \alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Pegawai berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Maka dengan ini hipotesis pertama (H_1) diterima, (2) Variabel Belanja Pegawai memiliki nilai t sebesar -5.811. Dengan uji signifikansi yang dilakukan didapatkan bahwa p -value t sebesar 0.000. Karena nilai p -value $< \alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Pegawai berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Maka dengan ini hipotesis pertama (H_2) ditolak, (3) Variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai t sebesar -.667. Dengan uji signifikansi yang dilakukan didapatkan bahwa p -value t sebesar .506. Karena nilai p -value $< \alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Maka dengan ini hipotesis pertama (H_3) ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa belanja pegawai (BP) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Dapat dilihat pada Tabel 10 yang ditunjukkan dengan signifikan sebesar 0.000 ($< 0,05$) dengan koefisien regresi positif sebesar -5.811. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Pegawai berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan, maka hipotesis pertama (H_1) diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Pratolo dan Yudha (2012) yang mengatakan bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Muklir (2010) yang menerangkan bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dan penelitian yang dilakukan oleh Saputro *et al* (2017) mengatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa belanja modal (BM) tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dapat dilihat pada Tabel 10 yang ditunjukkan dengan signifikan sebesar .959 ($> 0,05$) dengan koefisien regresi positif sebesar .051. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh negative terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan, maka hipotesis kedua (H_2) ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pratolo dan Yudha (2012) yang mengatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap

pendapatan asli daerah. Tidak Sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan Dwirandra (2014) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Dan Tidak Sesuai juga dengan peneliti Muklir (2010) juga mengatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil Pengujian statistik menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan signifikan sebesar .506 ($> 0,05$) dengan koefisien regresi positif sebesar -.667. Sehingga data disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan, maka hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyono (2016) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu peneliti Lusiana *et al.*, (2021) juga tidak sesuai karena menjelaskan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dan peneliti Nugraheni *et al* (2019) tidak sesuai karena menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Belanja Pegawai yang diukur dari total penjumlahan belanja pegawai pada kelompok belanja aparatur negara dan belanja pelayanan publik yang menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2017-2020, (2) Belanja Modal yang diukur dari total penjumlahan belanja modal pada kelompok belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2017-2020, (3) Jumlah penduduk yang diukur dari total penduduk yang berdomisili di wilayah Jawa Timur yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2017-2020.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, agar mendapatkan hasil yang memuaskan: (1) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya tiga variabel yaitu belanja pegawai, belanja modal, jumlah penduduk, dan masih terdapat faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi pendapatan asli daerah tetapi tidak digunakan dalam penelitian ini, (2) Periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya 4 tahun sehingga hasil penelitian yang dihasilkan terbatas.

Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan simpulan pada penelitian ini, maka saran yang disampaikan adalah sebagai berikut: (1) Sebaiknya menambahkan beberapa variabel bebas berupa variabel yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), hal ini agar dapat lebih jelas melihat faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) tersebut, (2) Penelitian ini hanya dilakukan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur, oleh karena itu dimungkinkan daya generalisasi penelitian ini rendah. Pada penelitian selanjutnya diharapkan mengambil sampel penelitian beberapa Provinsi yang ada di

Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. Z., I. Ramli., dan B. Jatmiko. 2013. Model Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi dan Kabupaten Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Manajemen* 17(1): 119-132.
- Budiman, A. I., Ermadiani., dan Ubaidillah. 2021. Peran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim. *Akuntabilitas* 15(2): 329-348.
- Dewi, I. A. D. K., dan I. W. Suartana. 2018. Penilaian Kinerja Berbasis Value for Money dan Sistem Online Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22(2): 1281-1307.
- Ghozali dan Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Spss* 19. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Spss* 25. Edisi Kesembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Idayati, F. 2008. Implementasi Kebijakan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Di Kota Surabaya. *EKUITAS(Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 12(4): 474-496.
- Jaya, I. P. N. P. K., dan A. A. N. B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7(1): 79-92.
- Lusiana., M. Neldi., dan S. Sanjaya. 2021. Analisis Investasi Sektor Pariwisata, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Retribusi Kawasan Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 9(1): 25-34.
- Mardiana, G. A. H. 2021. Analisis Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi* 31(1): 259-274.
- Muklir. 2010. Analisis Realisasi Pendapatan Daerah Sektor Perkebunan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen). *Jurnal Aplikasi Manajemen* 8(1): 125-137.
- Nugraheni, I. P., Rusmijati., dan L. R. Indrawati. 2019. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2018. *Dinamic: Directory Journal of Economic* 1(3): 338-347.
- Payu, B. R. 2014. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi* 18(1): 141-150.
- Pratolo, S., dan B.S. Yudha. 2012. Peran Faktor-Faktor Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Accounting and Investment* 12(2): 144-160.
- Priyono, N. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kota Magelang Periode Tahun 2001-2010). *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan* 1(1): 13-26.
- Rakatitha, P. N. K., dan Gayatri. 2017. Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21(2): 1575-1600.
- Ramadhan, P. R. 2019. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* 5(1): 81-87.

- Sanjaya, S., dan R. A. Wijaya. 2020. Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya Terhadap Pendapat Asli Daerah di Sumatera Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8(3): 559-568.
- Saputro, A. S., A. Permatasari., dan D. H. A. P. Eldo. 2017. Evaluasi Pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Banyumas Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014. *Journal of Governance and Public Policy* 4(3): 394-406.
- Sugiyono. 2015. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- _____. Nomor 32 Tahun 2014 *Pemerintah Pusat*. 17 Oktober 2014. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294. Jakarta.
- www.djpk.depkeu.go.id
- www.jatim.bps.go.id